

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BOJONEGORO

Istiqomah

Program Studi Akuntansi, STIE Cendekia Bojonegoro

anandaistiqomah212@gmail.com

Abstract

Causes of SILPA in the Trade Service Bojonegoro Regency Cooperatives and Micro Enterprises consist of regional budget revenues whose realization is greater than the targeted budget, resulting in an excess of regional income and expenditure whose realization is smaller than the targeted budget, thus indicating the remaining expenditure budget. This research aims to determine the Revenue Budget realization report. and Expenditures (APBD) at the Bojonegoro Regency Trade, Cooperatives and Micro Enterprises Service, to improve budgeting performance at the Bojonegoro Regency Trade, Cooperatives and Micro Enterprises Service. This research uses quantitative descriptive analysis methods using data collection techniques, namely documentation. The results of the research are that the financial ratio of the Bojonegoro Regency Cooperative Trade and Micro Enterprises Service for the 2020 budget year is very effective with a total of 102.83%, then in 2021 it is quite effective with a total of 80.67 % and in 2022 it will be ineffective with a total of 49.06%. Meanwhile, the expenditure performance of the Bojonegoro Regency Cooperative Trade and Micro Enterprise Service was very efficient in 2020, 2021 and 2022 with a total of 12.59%, 37.34% and 22.39%. From the research, it can be suggested to the Bojonegoro Regency Cooperative Trade and Micro Enterprise Service to make more efforts in increasing local original income (PAD) by finding and exploring PAD sources and maintaining economical use of the budget so that efficient spending targets are always achieved.

Keywords: reports on budget realization, regional income and expenditure, effective level of income and efficient level of expenditure.

Abstrak

Penyebab SiLPA pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro terdiri atas APBD pendapatan daerah yang realisasinya lebih besar daripada anggaran yang ditargetkan sehingga terjadinya pelampauan pendapatan dan belanja daerah yang realisasinya lebih kecil daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya sisa anggaran belanja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kinerja penganggaran di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Hasil penelitian adalah

bahwa rasio keuangan Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2020 sangat efektif dengan total 102,83%, kemudian tahun 2021 cukup efektif dengan total 80, 67% dan tahun 2022 tidak efektif dengan total 49,06%. Sedangkan kinerja belanja Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro sangat efisien pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan total sebesar 12,59%, 37,34% dan 22,39%. Dari penelitian dapat disarankan kepada Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro lebih berusaha lagi dalam peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencari dan menggali sumber-sumber PAD dan tetap mempertahankan penggunaan anggaran belanja secara hemat sehingga selalu tercapai target efisien belanja.

Kata Kunci: laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah, tingkat efektif pendapatan dan tingkat efisien belanja.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan pemerintahan daerah dalam membangun daerahnya adalah dengan adanya Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang menjadi patokan atau standar. APBD itu meliputi dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan dan pembangunan insfrakstruktur. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu menentukan kebijakan yang benar agar setiap anggaran mampu diolah dengan baik supaya tidak adanya kelebihan anggaran dari pendapatan total yang telah ditetapkan. Dari hal tersebut harus ada penyusunan anggaran di suatu instansi daerah dikarenakan merupakan bagian yang penting untuk tercapainya hasil yang maksimal. Selain itu suatu instansi pemerintah daerah harus mempunyai pimpinan yang berintegritas supaya dalam pengelolaan APBD terwujud sesuai tujuan.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Tugas pokok Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang perdagangan.

Tabel 1
Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro T.A 2020-2022

Tahun	SiLPA (Rp)
2020	69.700.877.969
2021	10.264.620.068

2022	5.346.489254
------	--------------

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bojonegoro tahun 2021-2022

Berdasarkan tabel diatas menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 77 Tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Penyebab adanya SiLPA pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro terdiri atas komponen APBD berupa pendapatan daerah yang realisasinya lebih besar daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya pelampauan pendapatan dan belanja daerah yang realisasinya lebih kecil daripada anggaran yang ditargetkan sehingga menunjukkan terjadinya sisa anggaran belanja. Perlu adanya klarifikasi jika terjadi kelebihan di masukkan kembali ke kas daerah atau juga kesalahan dari pencatatan yang kurang akuntabel sehingga terjadi selisih tersebut (Bisri, 2023).

Dari hal tersebut memberi dampak terhadap penentuan anggaran tahun berikutnya yaitu semakin tinggi besaran SiLPA maka akan terjadi pembengkakan pada anggaran belanja sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kecenderungan pemerintah daerah menganggarkan defisit serta makin tingginya SiLPA menunjukkan penyerapan anggaran yang rendah maka mengenai hal tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro harus memperhatikan penggunaan SiLPA sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menutup defisit dan membiayai program lain yang belum dianggarkan pada proses APBD awal yang harus digunakan dalam tahun anggaran berikutnya serta pengeluaran pembiayaan guna menyalurkan surplus anggaran sehingga diharapkan tidak mempengaruhi target capaian kinerja. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Laporan Realisai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kinerja penganggaran di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi tambahan, menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman akademik dalam bidang akuntansi khususnya terkait analisis laporan realisasi APBD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020-2022 yang nantinya akan bermanfaat dimasa mendatang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan agar mampu menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang akuntansi secara mendalam mengenai analisis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

2) Bagi Instansi

Selain sebagai sumber informasi dan data yang diterapkan sebagai masukan dan referensi untuk menelaah pelaksanaan laporan realisasi APBD dan potensi perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2022:2). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha membandingkan satu variabel

dengan variabel lainnya yakni laporan realisasi APBD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan usaha Mikro tahun 2020-2022.

Populasi dan sampel

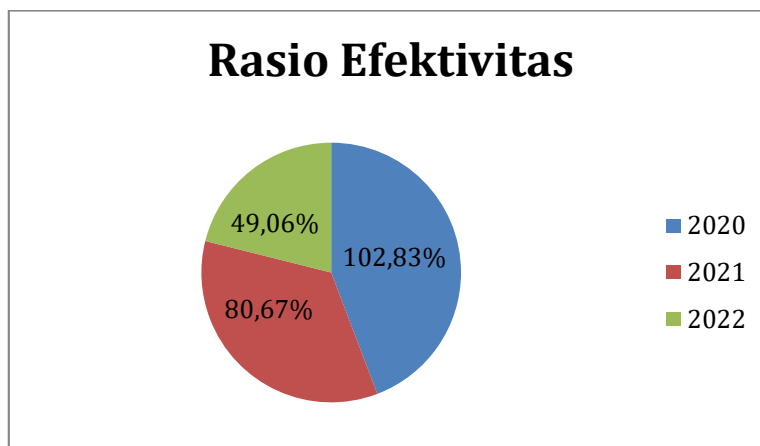
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022:126). Karena subjek penelitian ini adalah laporan realisasi APBD di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, maka populasi penelitian ini adalah keseluruhan laporan realisasi APBD yang tertera atau yang dipublikasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2022:127). Sampel penelitian ini adalah laporan realisasi APBD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro tahun 2020-2022.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2. Hasil Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan
Dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro T.A 2020-2022**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Presentasi (%)	Analisis Efektif
2020	2.047.144.400,00	2.105.091.741,00	102,83	Sangat Efektif
2021	8.007.542.290,00	6.460.359.937,00	80,67	Cukup Efektif
2022	10.896.895.440,00	5.346.489.254,00	49,06	Tidak Efektif

Sumber: data diolah penulis (2024)



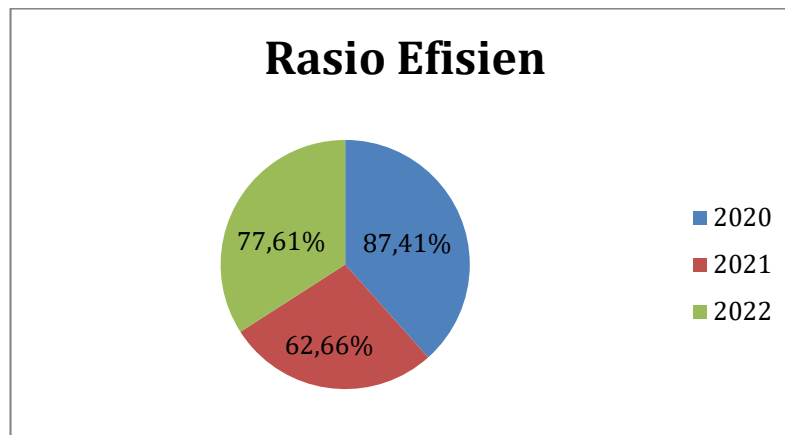
**Gambar 1. Hasil Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan
Dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro T.A 2020-2022**

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio efektivitas pendapatan pada Dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro T.A 2020. 2021 dan 2022 belum mencapai target. Pada tahun 2020 dalam kategori sangat efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan yaitu sebesar 102,83%. Pada tahun 2021 memiliki presentase sebesar 80,67% dan dalam kategori cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2022 dalam kategori tidak efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan yaitu sebesar 49,06%.

**Tabel 3. Hasil Rasio Efisien Anggaran Pendapatan
Dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro T.A 2020-2022**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rata-rata	Presentasi (%)	Analisis Efisien
2020	77.697.907.586,10	71.805.969.710,40	87,41	12,59	Sangat Efisien
2021	26.351.145.821,00	16.724.980.005,00	62,66	37,34	Sangat Efisien
2022	20.838.411.892,00	15.871.831.832,00	77,61	22,39	Sangat Efisien

Sumber: data diolah penulis (2024)



**Gambar 1. Hasil Rasio Efisien Anggaran Belanja
Dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro T.A 2020-2022**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio efisien belanja pada Dinas perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro T.A 2020-2022 dinilai sangat efisien dalam merealisasikan belanja karena dapat berhemat lebih besar dengan rasio efisien yaitu sebesar 12,59%, 37,34% dan 22,39%.

D. SIMPULAN

Tingkat efektif pendapatan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2020 sudah mencapai target dan sudah mencapai kategori sangat efektif karena berada pada predikat $>100\%$, hal ini dilihat dari lebih besarnya jumlah realisasi anggaran pendapatan dibanding dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 102,83%. Pada tahun 2021 tingkat efektif pendapatan dari Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro belum mencapai target namun sudah mencapai kategori cukup efektif karena berada pada predikat 80-90%, hal ini dapat dilihat dari lebih kecilnya jumlah realisasi anggaran pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 80,67%. Sedangkan pada tahun 2022 Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro tingkat efektif pendapatan belum mencapai target dan dalam kategori tidak efektif karena berada pada predikat $<60\%$. Kemudian tingkat efisien belanja Pada Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2020-2022 dinilai mampu

menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien karena berada pada predikat <60%.

E. SARAN

Berdasarkan atas simpulan dari penelitian ini dapat disampaikan beberapa saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan mengenai laporan realisasi anggaran bagi Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro antara lain:

1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro harus lebih berusaha lagi dalam peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) dengan mencari dan menggali sumber-sumber PAD yang potensial dan mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak retribusi dan lain-lain. Perlu diperhatikan bahwa dalam menggali PAD harus pula memperhatikan asas adil dan manfaatnya bagi masyarakat.
2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro pada efisien belanja harus tetap mempertahankan penggunaan anggaran belanja secara hemat sehingga selalu tercapai target efisien belanja.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian secara lebih rinci dalam menganalisis data sehingga hasil penelitiannya jauh lebih andal dan akurat dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Hasan. 2023. Analisis Perbandingan Antara APBD, LRA Dan LAKIP Untuk Penilaian Kinerja Kantor CAPILDUK Bojonegoro. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi*, 16(2), 130-136.
- Depdagri.1996. Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Dewi, Ni Putu Intan Cahyani. 2023. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020-2022*. Skripsi. Bali: Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, W. 2015. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- Diwa, Asterius., Laurentius D. G. Djou., Sesilianus Kapa. 2021. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Danbelanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi (JRIA)*, 2(1): 49-56.
- Hernandi, Dwi Alfallah Shaladin., Dwi Risma Deviyanti., Wulan Iyhg Ratna Sari. 2022. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(2):2715-3800.
- Lhalauw, Frillia Yuliet Ihalauw., Inggriani Elim., Peter M Kapojos. 2023. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019-2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6 (2): 1271 - 1280.
- Lubis, Putri Kemala Dewi, Etc., All. 2024. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3(1):325–335.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurlaeli, Eka., Candra Sigalingging. 2024. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2023 Pada Kabupaten Semarang. *JUSAPAK (Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan)*, 2(2): 46-56.
- Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah.
- Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Setiani, Tia., Rika Nurul Madila. 2019. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi*, 02(10):1979-8334.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. 2017. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Edisi pertama. Alfabeta Bandung.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi pertama*. Pustaka Baru Press Yogyakarta.

Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang APBD.

Undang – Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Yuliyanto, Wakhid., Uswatun Khasanah., Riza Umami. 2022. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis: Ekonomi Bisnis*, 6 (2): 456-468.